

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kesultanan Buton adalah satu dari kerajaan-kerajaan kepulauan di Nusantara yang bercorak kerajaan maritim. Kerajaan Buton yang kemudian berubah status menjadi kesultanan ini, Pemerintahannya berlangsung selama 628 tahun dihitung sejak dilantiknya Ratu Wa Ka khan sebagai raja pertama sampai dengan La Ode Falihi sultan terakhir. Periode kerajaan berlangsung selama 208 tahun telah memerintah 6 orang raja, satu orang raja dan sultan masa peralihan yaitu Raja/Sultan Murhum, kemudian menjadi kesultanan berlangsung selama 420 tahun. Dalam periode ini telah memerintah 37 orang sultan dengan 38 masa jabatan, satu sultan terpilih dua kali menjadi sultan, yakni Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (*Oputa Ikoo*) sultan ke-20 dan 23.
2. Pada kerajaan ini tumbuh permukiman di Kotaraja Wolio, seperti Perkampungan Pata-Limbona, kemudian pusat-pusat permukiman bertambah menjadi sio limbona. Diluar benteng Keraton berkembang permukiman baru di bagian selatan kota istanah dan di bagian utara. Faktor yang mendukung kemunculan Buton oleh karena letaknya yang strategis termasuk dalam jaringan dan jalur lalulintas pelayaran niaga di Nusantara. letak Geografi ini tentu merupakan faktor yang terpenting yang mendorongnya sebagai daerah terbuka dengan memperlihatkan

perkembangan yang pesat. Faktor yang mendukung kemunculan Buton oleh karena letaknya yang strategis termasuk dalam jaringan dan jalur lalulintas pelayaran niara di Nusantara. Letak geografi ini tentu merupakan faktor yang terpenting yang mendorongnya sebagai daerah terbuka dengan memperlihatkan perkembangan yang pesat. Selain itu terdapat pula faktor-faktor internal lainnya yang menjadi penentu, yaitu faktor sosial budaya dan faktor ekonomi.

3. Pelabuhan Bau-Bau dilalui para pedagang, akhirnya menggeser popularitas Koraja Wolio yang berpusat di Benteng Keraton Wolio. Kota Bau-Bau yang disebut juga kota bawah atau (Bandar Niaga) ini mengalami perkembangan dengan pertumbuhan permukiman baru, terutama dengan berdatangnya penduduk Keraton Wolio dan para pedatang dari Bugis Makassar menetap tinggal di Kota Bau-Bau. Kemajuan-kemajuan yang dicapai itu dapat dilihat sebagai berikut. Perkembangan Kota Bau-Bau dapat dilihat bahwa:

*pertama*, berlangsung antara abad ke-XIV sampai abad ke-XIX. Pada periode ini, secara politik Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara masih di bawah kontrol pemerintahan lokal, khususnya pemerintahan Kesultanan Buton yang pada periode itu menguasai hampir seluruh Sulawesi Tenggara. Pusat permukiman masyarakat di sekitar keraton sehingga perkembangan fisik kota hanya berlangsung di dalam kompleks keraton seperti pendirian benteng sebagai benteng pertahanan. Administrasi, Pendidikan (tradisional), dan kebijakan politik juga dijalankan di dalam keraton. Wilayah luar keraton pada periode ini hanya

dianggap sebagai wilayah pendukung dari segi politik dan ekonomi. Pelaku ekonomi dijalankan oleh para pejabat kerajaan dan etnis yang berasal dari luar penduduk setempat.

*Kedua*, perkembangan Kesultanan Buton, khususnya Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara berlangsung sesudah penandatanganan *Perjanjian Bungaya pertama* (1667) sampai tahun 1824 Perjanjian Bungaya yang diperbaharui. Pada periode ini perkembangan politik lebih dominan. Konflik antar kerajaan di Sulawesi (Kerajaan Gowa dan Bone) yang melibatkan Kerajaan Buton makin memperbarat keadaan. Akan tetapi, dampaknya bagi perkembangan kota adalah dalam hal perpindahan penduduk dalam arti migrasi masuk dan migrasi keluar. Penduduk yang merasa tertekan sebagai akibat dari konflik itu melakukan perpindahan ke daerah-daerah yang dianggap aman dan mudah dijangkau. Daerah itu salah satunya adalah Kota Bau-Bau. Hal itu terbukti dari banyaknya suku Bajo, Bugis, Makassar, dan Toraja yang membuka pemukiman baru dan tinggal di sekitar pantai di Pulau Buton. Ekonomi pun berkembang di dalam permukiman baru itu berupa perdagangan.

4. Perubahan yang menonjol terjadi ketika Bau-Bau menjadi ibu kota Afdeling Sulawesi Timur pada tahun 1911. Pada tahun 1915, Afdeling Buton dan Laiwoi digabungkan dengan Bungku dan Mori yang dipusatkan di Bau-Bau. Dampak langsung kebijakan ini adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas kota berupa sarana pelabuhan dan jaringan jalan. Selain itu, pendirian gudang batubara, asrama militer dan perumahan, air bersih, telepon, sekolah, serta fasilitas transportasi darat. Semua itu merupakan

bagian dari politik ekonomi Belanda, karena pada kenyataannya Pemerintah Hindia Belanda mengambil keuntungan dari semua fasilitas yang disediakan itu dalam bentuk pajak dan tenaga kerja.

5. Penguasaan Kesultanan Buton oleh Pemerintah Belanda secara ekonomi ditandai dengan proses produksi tambang aspal secara resmi, pembangunan dan pelebaran jalan ke daerah-daerah yang mempunyai hasil ekonomi penting seperti ke perkebunan kelapa dan daerah pedalaman yang mempunyai hasil hutan seperti rotan dan damar.
6. Perluasan Permukiman di Kesultanan Buton cenderung ke arah sekitar pantai. Pasar dan kantor syahbandar didirikan di sekitar pantai yang dekat dengan pelabuhan. Apabila melihat dinamika yang terjadi di Kota Bau-Bau, maka terlihat bahwa arah perkembangan kota lebih kepada suatu ciri kota niaga atau kota pelabuhan yang mengandalkan sektor perdagangan sebagai basis perkembangannya. Kondisi ini didukung oleh posisi geografis (letak kota) dan perilaku masyarakatnya yang sebagian besar berorientasi pada sektor pelayaran dan perdagangan. Perdagangan dan pelayaran intensif dilakukan ke daerah-daerah yang memungkinkan perolehan pendapatan tinggi secara ekonomi. Wajah kota-kota pantai di wilayah itu pun infrastrukturnya mengikuti jalur pantai dan orientasi ekonomi cenderung ke arah pengembangan pelabuhan sebagai pendukung perdagangan dan pelayaran.

## **B. Saran**

Adapun saran dari Peneliti terkait dengan Buton pada masa peralihan dari Kolonial Belanda Kependudukan Jepang tahun 1942 yaitu:

1. Agar dapat diketahui fakta adanya bangsa Barat (Kolonial Belanda dan pendudukan Jepang) di Buton, Pemerintah dan tokoh masyarakat harus bersama sama mencari Bukti atau peninggalan–peninggalan sejarah secara menyeluruh dilihat dari lokasi/tempat kejadiannya.
2. Peralihan (pergantian) dari satu kekuasaan kekuasaan lain atau kata lain dalam memperluas daerah jajahan yaitu dari Kolonial belanda Kependudukan Jepang maka yang perlu dilakukan oleh Masyarakat dan Aparat Pemerintah harus melakukan pengkajian yang mendalam dan referensi yang mendukung adanya peralihan dari Belanda Kependudukan Jepang di Buton.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Zahari. (abad ke-XVI-XIX). *Riwayat Sipanjonga*. (Naskah), Wolio.
- A.Razak Daeng Pentunru, ( 2000). *Makna dan Arti Falsafah ,Adat istiadat Buton*, hlm. 35-36
- Andi Zainal Abidin Farid, 1916. *Memori Kapten de Yonge*. Balai Pemerintahan Negeri Buton.
- Rahim Yunus Abdul, 1995. *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad ke-19*. Jakarta: INIS.
- Asvi Warman Adam. 2004. *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta; Arun Syabri
- Achadiati Ikram dkk, 2001. *Katalog Naskah Buton (Koleksi Abdul Mulku Zahari*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Daliman. A. 2011. *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Harjono. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Gde Widja, 1991. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- .....,1989. *Pertumbuhan dan Perkembangan Buton Bercorak Maritim*. Jakarta. hlm.19
- Haliadi. 2000. *Buton Islam dan Islam Buton: Islamisasi, Kolonialisme, dan Sinkretisme*. Yokyakarta; UGM.
- Koentjaraningrat. 1993. *Ritus Peralihan di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.
- Kuntowijayo, 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana..
- Mane Oba Laode, 2009. *perjuangan para petinggi Sultan Buton dan rakyat Buton*. Penerbit: Balai Pustaka.

(Nugroho Notosusanto, 1984. *Zaman Pendudukan Jepang*. (Bandung). Hlm. 5

La Ode Rabani, *Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*, (Yogyakarta: Ombak, 2010)

Onghokham, 1989. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta; Gramedia.

Polinggomang, 1991. Lamp II-3. *Kesultanan Buton merupakan Bandar niaga*. penerbit: Denpasar.

Ricklefs. M.C. 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta, Cet.1, Penerbit serambi Ilmu Semesta.

Sartono Kartodirjo. 1993. *Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta, Jilid 2. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

J.W Schoorl. 2003. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*. Jakarta: Penerbit Djambatan. Dan juga

....., *Power, Ideology, and Change in the Early State of Buton*.

Wertheim, W.F, 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi (studi perubahan sosial)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Susanto Zuhdi, 1994. *Hubungan Buton dengan Bangsa Barat*.

Said. A, 2005. dan Suryadi, 2007. *Perang Buton Dengan Kolonial Belanda*.

Slamet muljana, (1979). *Naskah Buton*.

....., 1999. *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton Abad XVII-XVIII*.

Ligvoet A. 1878 dan ----, 1994. *Buton dalam Jaringan Pelayaran Niaga di Wilayah Indonesia Bagian Timur Abad XVI – XVIII*. Makalah Seminar. Bali, Denpasar.

Ligtvoet A. 1878. *Letak Geografis Buton*. Jakarta: Djambatan.hlm. 50.

